

**PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU SOSIAL
YANG BERORIENTASI KKNi DAN KURIKULUM 2013**

Makalah
disajikan dan dibahas pada Seminar Nasional
“KKNi dan Kurikulum 2013 dalam Konteks Pengembangan
Kurikulum Pendidikan Ilmu Sosial” diselenggarakan dalam rangka
Dies Natalis ke-48 Fakultas Ilmu Sosial UNY,
1 September 2013

Oleh
Dr. MUKMINAN
Dosen Fakultas Ilmu Sosial - UNY
Email: mukminan.md@gmail.com
HP: 08157956800

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
2012**

PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU SOSIAL YANG BERORIENTASI KJNI DAN KURIKULUM 2013.

Makalah disajikan dan dibahas pada
Seminar Nasional "KJNI Dan Kurikulum 2013 Dalam Konteks
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ilmu Sosial"
Diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-48 Fakultas Ilmu Sosial UNY,
1 September 2013
Oleh: Dr. Mukminan (Dosen FIS UNY)

I. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan empat tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni: melindungi segenap wilayah Indonesia dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan pembelajaran yang dimaksud, dalam undang-undang ditegaskan perlu disusun delapan standar nasional pendidikan, salah satunya adalah standar proses.

Pertanyaan yang muncul adalah: mampukah bangsa Indonesia mencapai tujuan/cita-cita luhur yang telah dicanangkan oleh para pendiri NKRI tersebut? Tentunya tidak mustahil kita mampu, manakala kita memiliki sumberdaya manusia (sdm) yang kompeten. yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia yang patut diperhitungkan. Namun jika sdm yang kita miliki kurang memiliki kompetensi yang memadai, maka potensi itu justru akan menjadi beban berat luar biasa bagi negara. Maka langkah tepat dan cepat perlu diambil untuk menjamin terbentuknya generasi yang kompeten sesuai dengan tuntutan perkembangan, salah satunya adalah melakukan pengembangan/penyempurnaan kurikulum dari waktu ke waktu.

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan ilmu-ilmu social kiranya punya tanggung jawab serta kewajiban untuk melakukan upaya-upaya mendasar dalam pengembangan ilmu maupun kurikulum ilmu sosial

II. URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU SOSIAL

Kondisi nyata pendidikan saat ini, masih jauh dari berjalannya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Mutu lulusan pendidikan nasional belum menunjukkan kemampuan

berpikir kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif, kepribadian mereka juga belum seutuh dan sekokoh yang diinginkan. Kurang memiliki kepekaan sosial-budaya, rendah rasa kebangsaannya, dan rendah kesadaran globalnya. Lulusan dengan mutu rendah seperti ini pasti kurang mampu dalam memberi kontribusi pada pemenuhan kebutuhan hidup bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional meskipun bangsa ini memiliki SDA yang melimpah.

Sementara persyaratan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan kemerdekaan NKRI, diperlukan pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki: kemampuan berpikir tingkat tinggi (kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif), berkepribadian Indonesia (Pancasilais, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berperikemanusiaan, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, demokratis, dan adil), menjunjung tinggi budaya bangsa, memiliki kemampuan sosial-budaya, dan memiliki kesadaran global.

Lulusan yang demikian akan mampu berkontribusi kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa yang bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan menerapkan ipteks dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan

III. INTERPRETASI KURIKULUM

Terdapat berbagai interpretasi dalam mendefinisikan "kurikulum", tergantung kepada masing-masing kepercayaan filosofi yang digunakan. Demikian juga halnya dalam pemaknaan kurikulum. Sejumlah definisi tentang kurikulum dapat dirunut melalui sejumlah sumber, seperti Oliva (2005: 6-7) yang mengutip sejumlah definisi dari sejumlah tokoh, di antaranya: Kelompok pembelajaran yang sistematis atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor, misalnya kurikulum pelajaran sosial, kurikulum pendidikan fisika (Good); seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru (Caswell and Campbell); perencanaan untuk memperbaiki seperangkat pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik (Saylor, Alexander, and Lewis; pernyataan tujuan dan tujuan khusus, menunjukkan seleksi dan organisasi konten, mengimplikasikan dan meanifestasikan pola belajar mengajar tertentu, karena tujuan menuntut mereka atau karena organisasi konten mempersyaratkannya. Pada akhirnya, termasuk di dalamnya program evaluasi outcome (Taba); konten dan proses formal maupun non formal di mana pebelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman, perkembangan skil, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah (Ronald C. Doll); serta rekonstruksi dari pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang dikembangkan sekolah (atau perguruan tinggi), agar dapat pebelajar meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya (Danniel Tanner and Laurel N. Tanner). Sementara dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada menyebutkan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20/2003 maupun PP no.19/2005 yang disempurnakan dengan PP no.32/2013)

IV. MAKNA PENGEMBANGAN KURIKULUM

Terdapat sejumlah istilah, yang setara dengan pengembangan kurikulum, di antaranya: Pengembangan kurikulum (*Curriculum development*), merupakan istilah yang lebih komprehensif, di dalamnya termasuk perencanaan, penerapan, dan evaluasi dan berimplikasi pada perubahan dan perbaikan: Perbaikan kurikulum (*Curriculum improvement*), sering bersinonim dengan pengembangan kurikulum, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari pengembangan; dan Perencanaan kurikulum (*Curriculum planning*), yang lebih dimaknai sebagai fase berfikir atau fase desain.

V. MENGAPA KURIKULUM HARUS BERUBAH ?

Ada sejumlah alasan mengapa kurikulum senantiasa berubah, di antaranya:

Manusia dan Misi Kehidupan, terkait dengan: Manusia sebagai makhluk Tuhan, memiliki fitrah mencari kebenaran, kebaikan, dan keindahan; Manusia memiliki multi-kecerdasan; Manusia harus hidup terhormat, saling menghargai dan beradab

Perkembangan Ilmu Teknologi dan Seni (ITS), serta Perubahan Sosial, yang meliputi: ITS mengubah gaya hidup, dan menciptakan perubahan tatanan kehidupan global; Perubahan itu terjadi secara cepat dan terus-menerus (13%/Th); dan Diperlukannya kesetiaan terhadap nilai dan identitas dengan tetap terbuka, adaptif, dan kreatif pada perubahan

Pengalaman Empirik

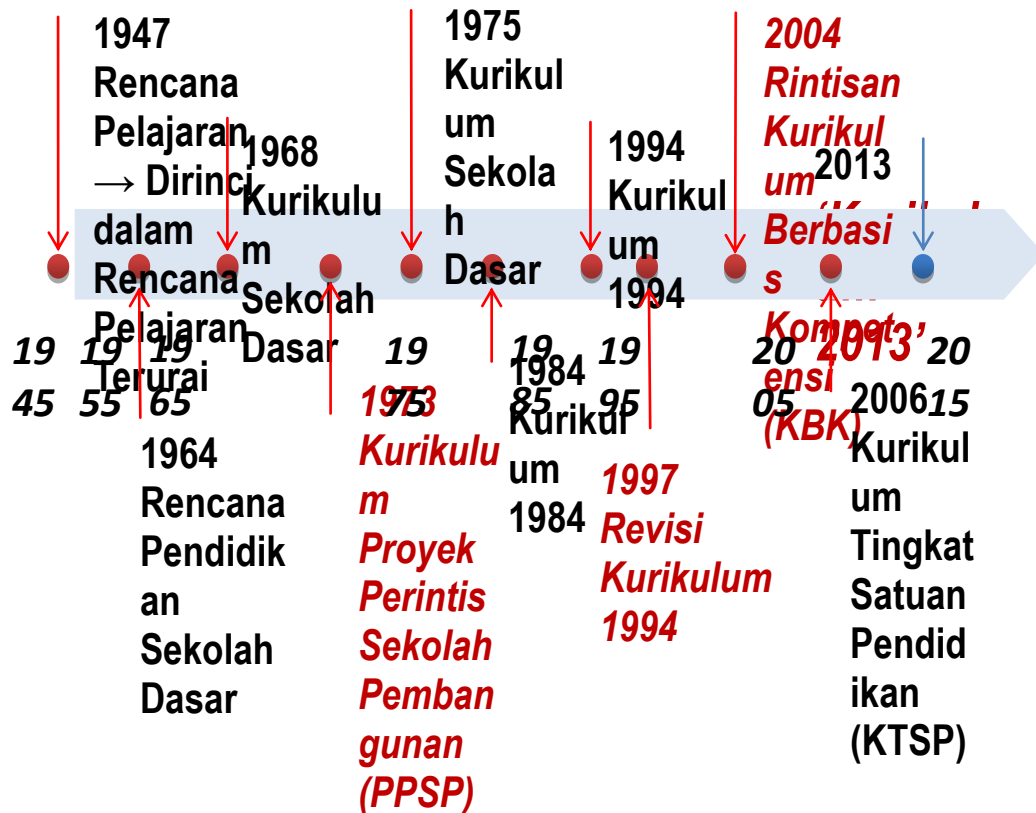
Keluhan berbagai pihak, seperti: Banyaknya jumlah mata kuliah / mata pelajaran; Saratnya materi; Padatnya jam belajar; Perlunya penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang sesuai dengan keperluan; dll.

Perlunya Perubahan Mindset

Menurut Prof. Rhenald Kasali Ph.D. Tantangan Indonesia Dalam Abad ke21/Refleksi Abad 21 meliputi:

- Perubahan begitu cepat
- Penuh Ketidakpastian & Bergejolak
- *Hyper Competition*
- Peradaban Kamera (*Camera Branding*)
- *Self –Centred*, Minat baca Meningkat (tetapi hanya ringkasan atau kalimat–kalimat pendek

Berikut adalah rekaman mengenai Perkembangan Kurikulum di Indonesia, sejak Republik ini berdiri hingga saat ini.



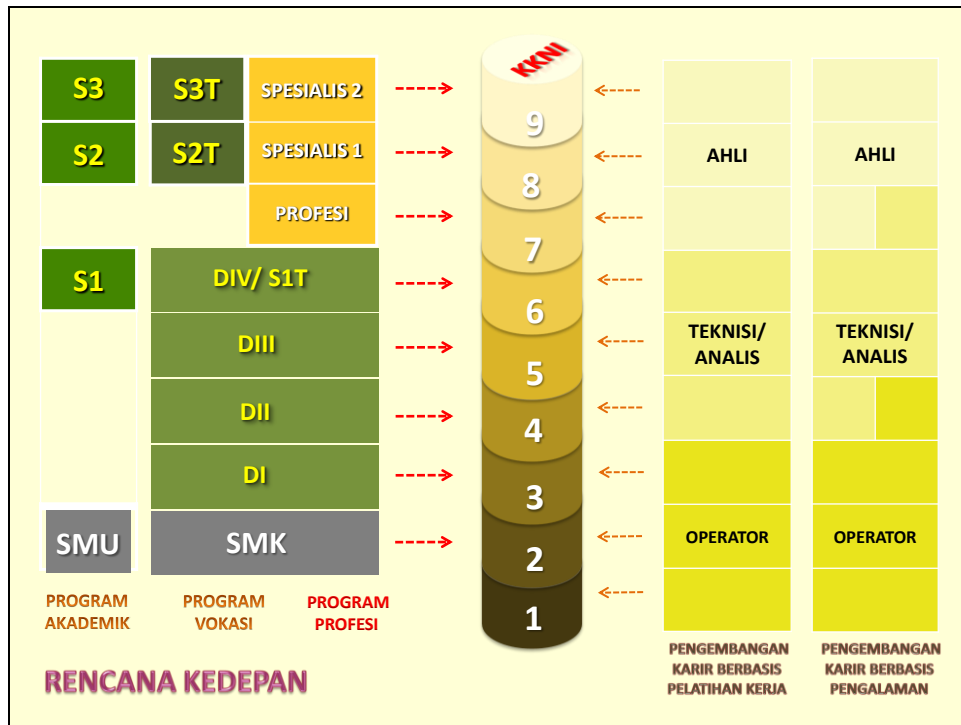
Dalam konteks Perjalanan Panjang menuju Perbaikan Kualitas Pendidikan, sesungguhnya **“Mitos” Ganti menteri ganti Kurikulum Tidak Pernah Ada**

VI. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, *Indonesian Qualification Framework, Dan Arah Kurikulum LPTK*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, dijelaskan beberapa konsep berikut:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (ps.1 ay.1);
2. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

3. KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi; dan
4. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.



5. Dengan terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2012, maka setiap perguruan tinggi, termasuk LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan) tentunya harus segera merumuskan kurikulum program studi yang berbasis KKNi (dan Kurikulum 2013).

VII. ARAH KURIKULUM LPTK

Bila setiap level kualifikasi dapat diraih melalui jalur lain di luar jalur pendidikan formal maka pendidikan formal harus lebih menunjukkan akuntabilitasnya dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan strata yang diprogramkan

Rambu-rambu yang harus dipenuhi

Di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

1. *Learning Outcomes*
2. Jumlah sks
3. Waktu studi minimum

4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
6. Akuntabilitas asesmen
7. Perlunya *Diploma Supplement* (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)

VIII. PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013

Tema Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang: Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif, melalui penguatan Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan yang terintegrasi

Elemen Perubahan pada Kurikulum 2013

Elemen utama yang mengalami perubahan terkait dengan Kurikulum 2013 meliputi empat elemen yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses, dan
4. Standar Penilaian

Standar-standar tersebut dikembangkan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maupun Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 itu sendiri.

1. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Kerangka Dasar Kurikulum adalah tatanan konseptual Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

2. Elemen-elemen Perubahan

Kompetensi Lulusan

Adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan

Kedudukan mata pelajaran/ mata kuliah

Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi

Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan

mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat, sementara buku bukan satu-satunya sumber belajar. Sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan

Proses pembelajaran hendaknya mengedepankan pendekatan saintifik dan kontekstual. Kemampuan kreativitas diperoleh melalui: *Observing* (mengamati), *Questioning* (menanya), *Associating* (menalar), *Experimenting* (mencoba), dan *Networking* (Membentuk jejaring).

Proses Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

Proses penilaian mengedepankan penilaian otentik yang dicirikan oleh:

- Penilaian berbasis kompetensi
- Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian otentik (mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil)
- Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal)
- Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL
- Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian

3. Analisis SKL, KI, dan KD (Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar)

PP no.32/2013 sebagai hasil perubahan atas PP no.19/2005, menyebutkan sejumlah konsep terkait dengan pengembangan Kurikulum:

1. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

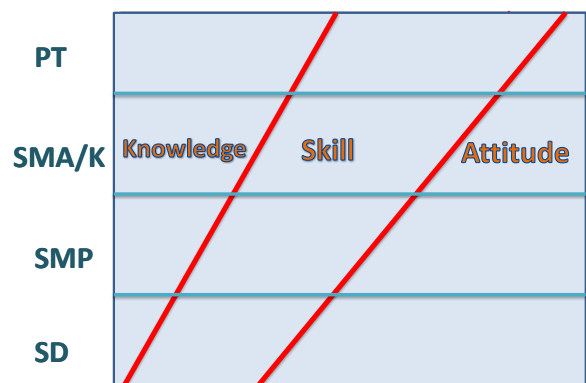
4. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
5. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.
6. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program.
7. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran.
8. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Keterkaitan KI dan KD dengan Perencanaan RPP

- Mengapa urutan KI mulai dari Sikap Spritual (KI-1), Sikap Sosial (KI-2), Pengetahuan (KI-3) dan Keterampilan (KI-4) ? (amati Pembukaan UUD 45, Pancasila, UU Sisdiknas)
- Mengapa urutan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran mulai dari KI-3 menuju KI-4 ? Keterampilan hanya dapat dibangun dengan hasil yang baik melalui pengetahuan (pelukis, penyanyi, olahragawan pasti memiliki pengetahuan yang memadai tentang keterampilan yang ditekuninya). Keterampilan yang tidak melalui proses pengetahuan (KI-3) tidak akan menghasilkan karya yang baik.
- Dalam proses perolehan pengetahuan dan keterampilan sikap diintegrasikan sehingga seluruh mata pelajaran diorientasikan memiliki kontribusi terhadap pembentukan sikap
- Tidak berhenti pada pengetahuan tetapi berlanjut sampai pada keterampilan dan pembentukan sikap

**Keseimbangan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan
untuk membangun *soft skills* dan *hard skills***

KURIKULUM 2013



Sumber: Marzano (1985), Bruner (1960).

4. Pendekatan Pembelajaran

Ciri pembelajaran dalam Kurikulum 2013 adalah pendekatan *scientific* yang dicirikan oleh pengembangan kemampuan dan keterampilan dalam: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan

Sementara Model Pembelajaran yang sangat dianjurkan adalah: *Inquiry - Discovery learning, Problem based learning, Project based learning, dan Collaborative learning*

5. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian yang dianjurkan adalah jenis penilaian otentik, yakni:

- penilaian berbasis portofolio
- pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal,
- memberi nilai bagi jawaban nyeleneh,
- menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya,
- penilaian spontanitas/ekspresif,
- dll.

IX. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU SOSIAL BERBASIS KKNI DAN PERMENDIKBUD NO.32/2013

Hasil kajian mengenai pengembangan kurikulum ini, yang terpenting adalah pada dimensi implementasinya. Beauchamp (1975: 164) mengartikan implementasi kurikulum sebagai "a process of putting the curriculum to work". Fullan (Miller dan Seller, 1985: 246) mengartikan implementasi kurikulum sebagai "the putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the individual or organization using it". Berdasarkan atas dua

pendapat tersebut, sesungguhnya, implementasi pengembangan kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan desain kurikulum serta pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan operasional di kelas, yaitu mulai dari pengembangan desain kurikulum sampai proses *transmisi* dan *transformasi* segenap pengalaman belajar kepada peserta didik.

Adapun kegiatan yang perlu dilakukan dalam implementasi pengembangan kurikulum ilmu sosial berbasis KKNi dan Permendikbud no.32/2013, adalah:

1. Melakukan analisis SWOT, Tracer study, untuk menjabarkan profil lulusan (SKL)
2. Merumuskan Kompetensi lulusan (*LearningOutcomes*) berbasis KKNi
3. Pemilihan bahan kajian sesuai 5 elemen kompetensi untuk menyusun matakuliah
4. Membuat matrik yang menggambarkan peta kompetensi, keluasan, kedalaman dan kemampuan yg ingin dicapai dg bahan kajian
5. Membuat deskripsi untuk setiap mata kuliah kajian sesuai besaran sks
6. Menyusun struktur kurikulum Fakultas/Prodi, beserta Perangkat pembelajarannya

DAFTAR BACAAN

Beauchamp, G. (1975). *Curriculum theory*. Willmette, Illionis: The Kagg Press.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2011). Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, *Indonesian Qualification Framework*, dan Arah Kurikulum LPTK,

Kemdikbud (2013). Bahan-bahan Sosialisasi Kurikulum 2013

Oliva, Peter F. (2005). *Developing The Curriculum* (Sixth Edition). Boston: Pearson Education, Inc.

Peraturan Pemerintah (2005) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah (2013) Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi),

Seller dan Miller. 1985. *Curriculum; perspectives and practice*. New York: Longman.

Undang-Undang (2003) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional